HARIAN UMUM NusaBali

Anggaran Terbatas, Pembangunan Pasar Desa Antre

• NUSABALI/LILIK

SALAH satu proses pembangunan pasar desa di Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Buleleng, mengaku kewalahan dalam menerima ajuan pembangunan pasar desa. Bagaimana tidak, untuk memenuhi puluhan ajuan revitalisasi pasar tradisioal yang ada tahun ini, masih terkendala masalah anggaran yang masih minim. Akibatnya puluhan ajuan tersebut harus masuk dalam daftar antrean dan menunggu untuk proses realisasi yang tidak dapat ditentukan.

"Memang tahun ini ada banyak yang mengajukan ajuan untuk membangunan pasar desa. Namun kami yang membidangi hal tersebut, belum dapat memastikan, karena anggarannya belum ada. Ini kami juga sedang melobi untuk mendapatkan jumlah anggaran yang lebih banyak," ujar Kepala Didkopdagrin Buleleng, Ir Ni Made Arnika, dikonfirmasi Senin (9/11) kemarin.

Ia mengaku belum berani menyebutkan secara pasti berapa jumlah anggaran dan ajuan dari desa apa saja yang akan direalisasikan tahun 2016 mendatang. "Belum berani saya pastikan, karena belum ada kepastian, karena anggarannya cukup besar, kami sedang lobi, sabar dulu," tegasnya.

Namun Arnika mengatakan, dalam penentuan realiasasi pasar desa tahun 2016, masih memprioritaskan kebutuhan diantara desa-desa yang mengajukan. Sementara untuk realisasi pembangunan pasar desa tahun ini, sudah selesai seratus persen. Diantaranya pasar Gerokgak, Bengkel dan Munduk.

Tiga pasar desa tersebut, memakan anggaran total sekitra Rp 1, 6 miliar. Masing-masing, Rp 267 juta untuk pasar desa Munduk, Rp 199 juta untuk pasar desa Bengkel dan Rp 1,4 Miliar untuk pasar desa Gerokgak.

Sementara dengan anggaran yang masih terbatas, Arnika mengatakan realisasi pembangunan pasar desa akan dilakukan secara bertahap. Ia pun berharap, dengan adanya pasar desa di masing-masing desa dapat meningkatkan roda perokonomian masyarakat Buleleng. k23

Edisi : Selasa, 10 Nov 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Biaya Servis Rp 2 M, Kapal Roro Rusak Lagi

SEMARAPURA, NusaBali

Kapal Roro Nusa Jaya Abadi (NJA) milik Pemkab Klungkung, yang baru saja pulang dari doking, kini kembali mengalami kerusakan. Akibatnya, kesiapan kapal ini bisa beroperasi masih mengundang tanda tannya.

Padahal, kapal ini digadang-gadang menanggulangi luberan penumpang yang diyakini meningkat menyusul pujawali di Pura Penataran Ped, Nusa Penida, Buda Cemeng Kelawu, Rabu (11/11). Informasi di lapangan, kerusakan terjadi pada pompa gear box mesin sebelah kanan yang menyebabkan oli tak bisa terpompa. Akibatnya, kapal tak bisa maju- mundur. Padahal Roro NJA ini baru saja selesai doking di Surabaya selama 40 hari.

Kepala Dishubkominfo Klungkung I Nengah Sukasta tak berhasil diminta konfirmasinya terkait kerusakan Roro NJA. Ponselnya menunjukkan tanda aktif, ketika dikontak, namun tidak ada jawaban. Namun kepastian adanya masalah pada roro dibenarkan Sekretaris Dishubkominfo I Dewa Made Sutarta. Dijelaskan Dewa Sutarta, Bupati I Nyoman Suwirta sudah mendapat laporan kerusakan dan mengecek kondisi kapal Roro, Minggu (8/11). Bupati kemudian memerintahkan agar langsung dilakukan perbaikan secepatnya, mengingat luberan penumpang jelang pujawali di Pura Penataran Ped, Nusa Penida. "Bagian yang rusak sudah dikirim ke Surabaya, dimana roro doking" ujar Dewa Sutarta.

Kerusakan terjadi pada komponen pompa gear, sehingga kapal tak bisa maju-mundur. " Pas ketika memasuki perairan Nusa Penida, rusak," ucap Dewa Sutarta. Komponen yang rusak tersebut sudah dikirim dengan paket bus ke Surabaya, karena ukurannnya tidak terlalu besar. Dengan harapan segera bisa diperbaiki sehingga Roro NJA bisa beroperasi.

Dijelaskan Dewa Sutarta, bagian komponen yang rusak tersebut tidak termasuk dalam kategori doking. Karena saat itu kondisinya terlihat masih bagus. Namun kenyataan setelah tiba di Nusa Penida, malah rusak.

Sebelumnya, Roro NJA masuk doking pada Senin, 28 September 2015. Doking dilakukan di Surabaya, selama 40 hari dengan biaya Rp 2, 011 miliar. Doking tersebut wajib dilakukan setiap tahun untuk mengecek kondisi kapal.

Di tempat terpisah I Wayan Misna, salah seorang anggota DPRD Klungkung, sangat menyayangkan rusaknya Roro NJA. Padahal baru saja usai doking. Misna pun mempertanyakan proses doking yang menggunakan bersumber dari APBD. "Kok baru usai doking sudah rusak. Kesannya seperti awag-awagan," protes Misna, asal Nusa Penida.

Dia mengaku akan menanyakan lebih jauh soal proses doking tersebut karena menyangkut aset Pemkab dan kepentingan masyarakat. " Pasti kami akan tanyakan lagi," tegas Misna.

Sementara karena mengalami kerusakan Roro NJA pun hanya nganggur di Dermaga Nusa Penida. Padahal, jika normal, kapal ini harus melayani penyeberangan ke Nusa Penida lewat Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Luberan penumpang dipastikan membludak karena jelang pujawali di Pura Penataran Ped, Nusa Penida.

Untuk diketahui, Kapal Roro NJA merupakan kapal bantuan Gubernur Bali pada masa Gubernur Dewa Made Berata tahun 2006. Bantuan kapal roro tersebut untuk membantu pengangkutan barang ke Nusa Penida dan sebaliknya yang sebelumnya terbatas hanya dengan sampan dan boat. **k17**

Edisi : Selasa 10 November 2015

Hal : 6

HARIAN UMUM NusaBali

BPK Mulai Periksa Penggunaan Dana Desa

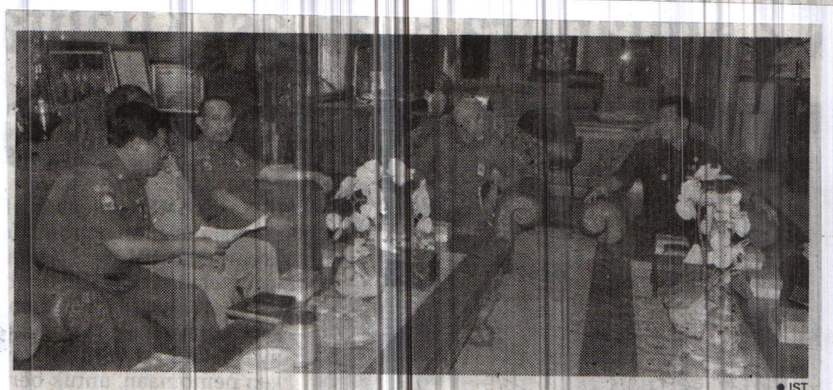

● IST

PENJABAT Bupati Tabanan Wayan Sugiada bersama jajaran menyambut kedatangan tim BPK Perwakilan Bali di ruang kerja Bupati Tabanan, Senin (9/11).

TABANAN, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menurunkan tim ke Kabupaten Tabanan untuk melakukan pemeriksaan dana desa. Distribusi dana desa seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa di Kabupaten Tabanan mendekati seratus persen. Kabupaten Tabanan bersama Buleleng menjadi kabupaten pertama yang dapat pemeriksaan BPK.

Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bali sekaligus pimpinan rombongan, Amri Lewa mengawali pertemuan dengan Penjabat Bupati Tabanan Wayan Sugiada di kantor bupati, Senin (9/11). Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa bersama Asisten I Wayan Yatnanadi, dan Asisten III Made Sukada, Inspektur Gede Urip Gunawan, Kepala BPMPD Gusti Ngurah Supanji serta Kabag Keuangan Wayan Arimbawa ikut menyambut kedatangan tim dari BPK.

Inspektur Tabanan, I Gede Urip Gunawan menjelaskan, tim dari BPK akan melakukan pemeriksaan selama 35 hari. "Dan, kegiatannya dimulai sejak Senin ini," jelasnya. Sementara itu, Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada berterima kasih kepada BPK yang mempercayakan Tabanan sebagai daerah pertama yang mendapatkan pemeriksaan. Meskipun, dari BPK sendiri menjelaskan tidak ada alasan khusus mengapa Tabanan maupun Buleleng menjadi daerah pertama yang diperiksa.

"Itu bukan menjadi persoalan. Justru sebaliknya, kita patut bersyukur mendapat kesempatan pertama. Apa yang kurang dan apa yang menjadi kelemahan dalam penggunaan dana desa bisa diketahui untuk diperbaik," tegasnya.

Menurutnya, sebelum berlakunya Undang-undang Desa, Pemkab Tabanan sudah berkomitmen dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih pada Minggu (8/11) dilangsungkan pemilihan perbekel atau kepala desa secara serentak. "Untuk dana desa, sejauh ini realisasinya sudah sampai 80 persen. Sisanya ini minimal 90 persen harus sudah terealisasi. Tapi mengingat akhir tahun sudah semakin dekat dan banyak hari raya, kami berharap pemeriksaan ini berjalan efektif. Paling tidak pemeriksaan efektif berlangsung selama sebulan," ujarnya.

Sementara itu, Amri Lewa berharap, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya difasilitasi oleh BPMPD selaku *leading sector* pemerintahan desa. "Berapa dana yang diterima dari APBN, berapa yang diterima desa, dan dipakai untuk apa saja," bebernya. Dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada alasan khusus mengapa Tabanan dipilih sebagai daerah pertama yang diperiksan selain Buleleng. Namun dia memperkirakan, Tabanan dan Buleleng terhitung mengelola dana desa yang cukup besar. Mengingat luas wilayah dan jumlah desanya yang bergitu besar. **@k21**

Edisi : Selasa, 10 Nov 2015

Hal : 17

HARIAN UMUM NusaBali

Pembahasan RIP Dermaga Curah

Buleleng Bawa Opsi Perda RTRW

SINGARAJA, NusaBali

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan Celukan Bawang, Selasa (10/11) hari ini dibahas oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, Kemenhub. Pemkab Buleleng yang ikut diundang dalam pembahasan tersebut telah menyiapkan opsi pengaman pembangunan di wilayah Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak.

Opsi tersebut berupa Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten. "Intinya kita hanya ingin RIP itu mengacu pada Perda RTRW," ujar Kadis Perhubungan Kabupaten Buleleng I Gede Gunawan AP, yang dikonfirmasi sebelum bertolak ke Bogor – tempat pertemuan Senin (9/11).

Dalam pertemuan Selasa hari ini (sebelumnya disebut Senin), Pemkab Buleleng mengutus Kadis Perhubungan Gunawan dan Kepala Bappeda Buleleng I Gede Dharmaja untuk menyampaikan opsi dalam pembahasan RIP tersebut. Ditjen Perhubungan Laut juga mengundang Dinas Perhubungan dan Bappeda Provinsi dalam pertemuan tersebut, termasuk dari pihak Pelindo III Surabaya cabang Pelabuhan Celukan Bawang dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOB) Celukan Bawang.

Kadis Perhubungan Gunawan mengatakan, sesuai Perda RTRW bahwa pelabuhan Celukan Bawang dimanfaatkan untuk pelabuhan orang dan bongkar muat. Karena itu, rencana pembangunan dermaga curah cair di Pelabuhan Buleleng, dianggap tidak susuai dengan Perda RTRW. "Kami juga belum megetahui, jenis muatan yang bongkar muat di dermaga curah cair, karena sampai saat ini belum ada kejelasan," terangnya.

Menurutnya, kalau nanti bongkar muat di dermaga curah cair itu adalah minyak atau hasil olahan lain seperti gas, dipastikan tidak sesuai dengan Perda RTRW. Karena mengacu pada Perda yang ada, bongkar muat minyak dan olahan lainnya itu berada di wilayah Karangasem. "Kalau yang dimaksud didalamnya itu adalah minyak atau hasil olahan lainnya, mari sepakati sesuai Perda RTRW Provinsi Bali. Karena disana sudah ada Labuhan Amuk (Pelabuhan Manggis, Red) untuk hal seperti ini," katanya.

Hanya saja pertemuan yang akan berlangsung Selasa hari ini, bukan pertemuan yang bersifat final. "Kementerian Perhubungan pasti punya pandangan tersendiri, dan itu perlu kami sampaikan kepada pimpinan dulu. Kami ingin pemahaman yang sama masalah ini. Itu yang utama. Ketika pemahaman sama, nanti kan sama-sama membahas. Mutlak nanti dari Kesyahbandaran melakukan ekspose di depan pimpinan daerah," kata Gunawan lagi.

Sementara Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Buleleng, I Made Budi Astawa kembali menegaskan, tudingan meminta uang dibalik penghentian sementara proyek dermaga curah cair tersebut tidak mendasar. Justru tudingan itu dianggap sebagai pembunuhan karakter.

"Itu fitnah, kalau memang ada data seperti yang ditulis di Koran, buktikan. Saya ingin tahu orangnnya, kalau tidak benar saya ingin lapor kepolisi karena telah mencemarkan nama baik pemerintah dan saya selaku Kasat polpp," tegasnya. Budi Astawa juga menegaskan, jika ada salah satu anggotanya yang terbukti akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada. k19

Edisi : Selasa, 10 Nov 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Pemkab Berharap Kepastian Status Aset Pemprov

Bali Post/ist

KUNJUNGAN - ***Pansus Aset DPRD Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Pemkab Tabanan untuk memastikan kelengkapan aset.***

Tabanan (Bali Post) -

Aset merupakan masalah vital yang mendapat perhatian serius pada saat pemeriksaan oleh tim BPK RI. Untuk memastikan kelengkapan aset di Kabupaten Tabanan, Ketua Tim Pansus Aset DPRD Provinsi Bali Wayan Gunawan bersama tim dan Kepala Biro Aset Provinsi Bali I Ketut Adiarsa berkunjung ke Pemkab Tabanan, Senin (9/11) kemarin.

Dari data aset Pemkab Tabanan, terdapat 459 bidang tanah milik Provinsi Bali yang berada di Tabanan. Sebanyak 74 bidang telah dimanfaatkan Pemkab Tabanan sebagai kantor, puskesmas pembantu, dan balai benih ikan. Sementara 385 bidang berupa sawah dan tegalan dikelola langsung oleh Pemprov Bali dengan masyarakat Tabanan. "Jadi, dari 459 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Bali, 74 telah dimanfaatkan pemkab, sedangkan sisanya dikelola oleh masyarakat," jelas Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada.

Pihaknya berharap aset-aset yang telah dimanfaatkan oleh Tabanan ke depan memiliki status yang jelas, bila perlu dihibahkan, karena terkait dengan pemeliharaan. Contohnya Subak Sanggulan yang luasnya 6,8 hektar sampai saat ini statusnya masih pinjam pakai. Oleh karenanya, Pemkab Tabanan tidak bisa menganggarkan dalam hal pemeliharaan. "Kami hanya bisa merehab secara kecil-kecilan," katanya.

Sugiada juga memohon agar hibah tanah untuk pembangunan RS Pratama dan Museum Tanah, serta pemanfaatan aset propinsi Bali untuk kabupaten bisa segera direalisasikan. "Kami berharap kedatangan pansus akan memberi solusi dan manfaat dalam penyelesaian masalah aset," tambahnya.

Sementara itu, Wayan Gunawan mengungkapkan, asas-asas pengelolaan aset antara lain fungsional dan kepasatian hukum. Dalam asas fungsional, aset harus dimanfaatkan sesuai fungsinya. Sementara dalam asas kepastian hukum, saat ini masih ditemukan konflik dengan masyarakat seperti saling klaim wilayah. "Mudah-mudahan di Tabanan tidak terjadi konflik," tegasnya. Sementara yang ketiga adalah nilai aset meliputi nilai transaksi yang masih menjadi suatu persoalan.

Tanah-tanah sawah di Kabupaten Tabanan cukup banyak digarap oleh masyarakat. Namun, kontribusi kepada provinsi untuk ikut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. "Selama ini pembagian hasilnya 60 untuk provinsi dan 40 buat penggarap," ujarnya.

Menurut Gunawan, perlu Surat Izin Menggarap yang diberikan kepada masyarakat penggarap, sehingga ada pola kerja sama yang jelas, kepastian hukum, dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset. Ia berharap ada sinkronisasi data antara Pemkab Tabanan dan Pemprov Bali. **(kmb28)**

Edisi : Selasa, 10 Nov 2015

Hal : 14